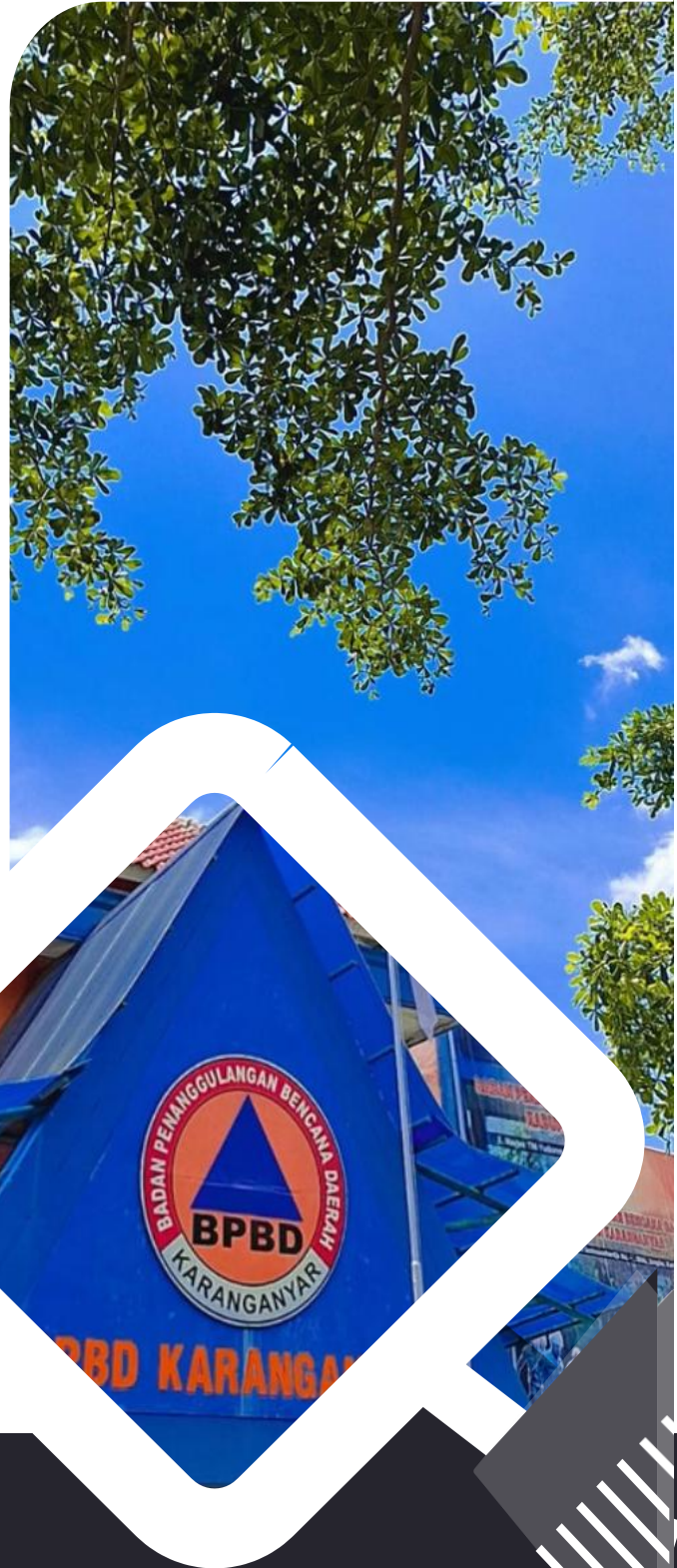




RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



TAHUN 2025 - 2029



(0271) 495 997



bpbdkaranganyarkab.go.id



[bpbdkaranganyar](https://www.instagram.com/bpbdkaranganyar)

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029



RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 yang disusun mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, serta berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai suatu Dokumen Perencanaan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu RENSTRA merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar hingga tahun 2029.

Dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Karanganyar, 19 September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



HENDRO PRAYITNO, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19760531 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	III-3
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama	IV-32
4.3. Indikator Kinerja Kunci	IV-34
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan Penting Substansial	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pedoman Transisi	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	II-5
Tabel 2. 2 Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	II-5
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	II-5
Tabel 2. 4 Pertumbuhan Kinerja Indikator BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Keuangan BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024	II-10
Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPBD.....	II-16
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.....	III-2
Tabel 3. 2 Tahapan Rencana Strategis.....	III-4
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar	III-5
Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra BPBD	IV-4
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	IV-13
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-26
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama BPBD.....	IV-32
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci.....	IV-33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	I-2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar	II-4
Bagan 4. 1 Pohon Kinerja BPBD	IV-30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

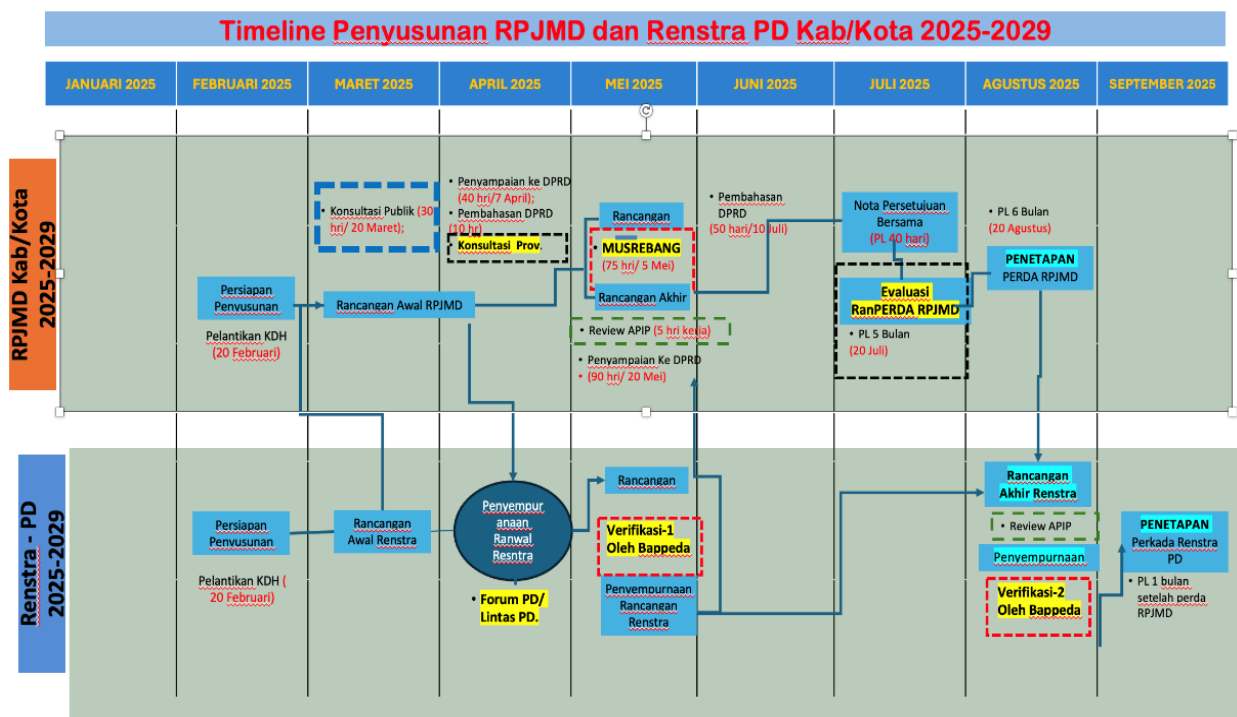
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penanggulangan bencana.

Landasan hukum penyusunan Renstra yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Renstra. Renstra perangkat daerah menjadi instrumen strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyelarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 menjadi penjabaran teknis visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD.

Pembangunan Kabupaten Karanganyar menghadirkan tantangan dalam penanggulangan bencana, antara lain topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi di sekitar Gunung Lawu. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem. Dalam hal ini, BPBD Karanganyar memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan pelayanan publik di bidang penanganan bencana alam.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Sumber : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 1. 1 Bagan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra BPBD Karanganyar Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Kabupaten Karanganyar, serta kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Karanganyar untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
 17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar dan sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Adapun tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPBD.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika

Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber

- daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran layanan; permasalahan dan isu strategis.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).
- BAB V PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar mengacu pada beberapa peraturan daerah, antara lain Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per

angkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebencanaan. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Bencana.

Tugas Kepala Badan meliputi:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana secara terintegrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- b. pengomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
- c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan reformasi birokrasi, pelayanan publik, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, merumuskan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengorganisasian, ketatausahaan, keuangan, aset/barang, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerumahtanggaan, kearsipan, kehumasan, Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP), informasi dan dokumentasi, pengendalian terhadap program, kerja sama serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kegiatan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi dan dokumentasi;

- d. pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana. Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi

Bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana. Kepala bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pasca Bencana alam.

Dalam melaksanakan, kepala bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

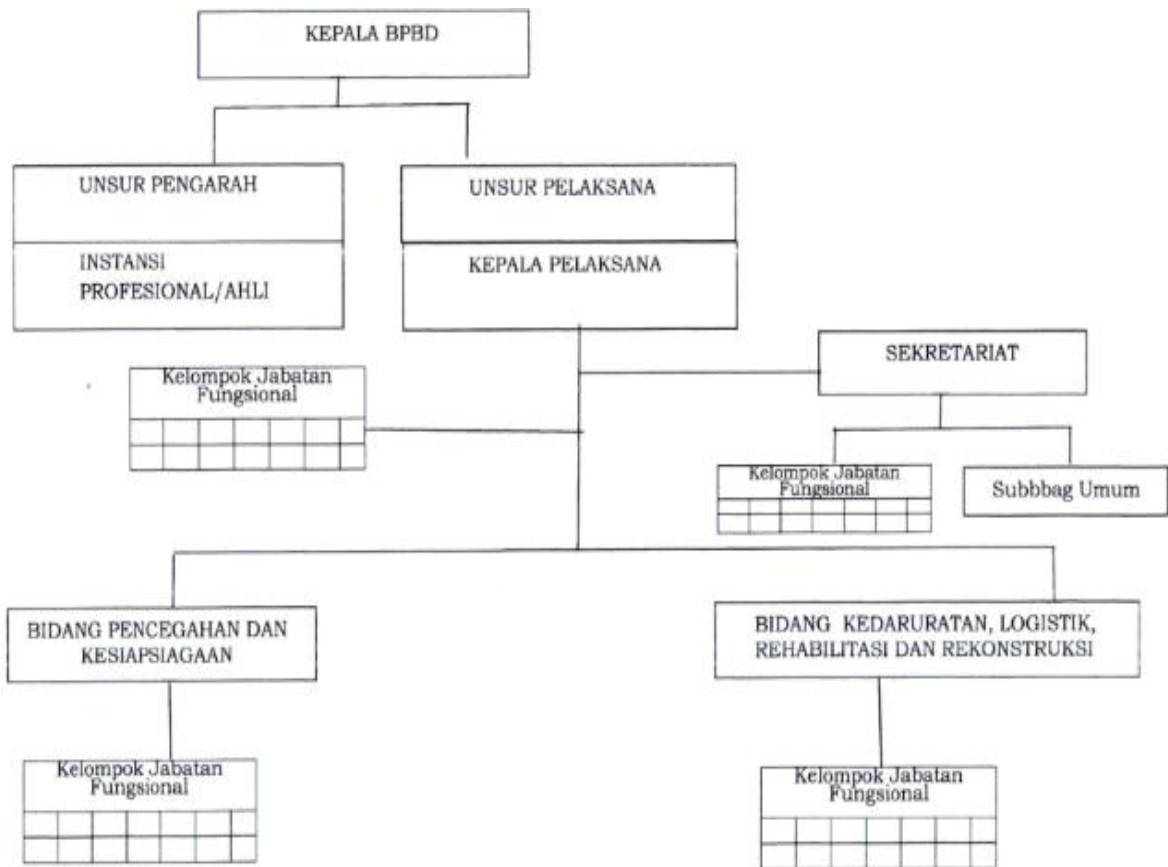
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat,

- penanganan pengungsi, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pasca bencana; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pasca bencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana/kepala sekretariat/kepala bidang sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang bekerja di BPBD Kabupaten Karanganyar sebanyak 65 orang, yang terdiri atas PNS sebanyak 19 orang PPPK 3 orang dan Non PNS sebanyak 43 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 40 orang berpendidikan SMA, 6 orang D3, 14 orang S1, 5 orang S2. Rincian lengkap mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	8	1	28	3	40
3	D3	1	1	4	0	6
4	S1	4	2	4	4	14
5	S2	5	0	0	0	5
6	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah	15	4	35	6	63

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tabel 2. 2 Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	5	1	6
3	Golongan III	8	3	11
4	Golongan IV	2	0	2
5	Golongan V (PPPK)	3	0	3

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa komposisi sumber daya manusia di BPBD cukup beragam dari sisi jenjang pendidikan. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA, yaitu sebanyak 40 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Upaya untuk mencapai target kinerja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, berikut kondisi sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	STATION WAGON OPERASIONAL KEPALA	Unit	1		1
2	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
3	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
4	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
5	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
6	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
7	STATION WAGON OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
8	TRUCK + ATTACHMENT OPERASIONAL DAPUR UMUM	Unit	1		1
9	PICK UP OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
10	PICK UP OPERASIONAL LAPANGAN	Unit	1		1
11	MOBIL JENAZAH OPERASIONAL AMBULAN	Unit	1		1
12	MOBIL TANGKI AIR OPERASIONAL TANGKI AIR	Unit	1		1
13	SEPEDA MOTOR	Unit	10		9
14	SEPEDA MOTOR	Unit	1		1
15	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Unit	2		2
16	AIR CONDITIONING (AC)	Unit	12		12
17	SOUND SYSTEM	Unit	3		3
18	CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	Unit	2		2
19	LCD PROJECTOR/INFOCUS	Unit	2		2
20	PORTABLE GENERATING SET TOWER	Unit	3		3
21	MEGAPHONE	Unit	2		2
22	ALAT PEMADAM/PORTABLE	Tabung	5		5
23	PERSONAL COMPUTER	Unit	17		17
24	LAP TOP	Unit	11		11
25	SERIAL PRINTER	Unit	17		17
26	TABLET PC	Unit	1		1
27	MONITOR	Unit	1		1
28	HANDY TALKY (HT)	Unit		2	2
29	UNIT TRANCEIVER VHF PORTABLE	Unit	4		4
30	UNIT TRANCEIVER SSB PORTABLE	Unit	1		2
31	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF LAINNYA (DST)	Unit	1		1
32	FACSIMILE	Unit	1		1
33	TELEPON ANALOG	Unit	1		1
34	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE LAINNYA (DST)	Unit	2		2
35	GERGAJI CHAIN SAW	Unit	5	2	7
36	PERAHU KARET (ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS)	Unit	7	1	8
37	SPEED BOAT / MOTOR TEMPEL	Unit	6	1	7

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
38	POMPA AIR/ALCONE	Unit	4	2	6
39	POMPA AIR 23 HP/POMPA AIR PEMADAM	Unit	5		5
40	TANKS (TABUNG SELAM)	Unit	2		2
41	BREATHING APPARATUS	Unit	2		2
42	MESIN BOR BETON	Unit	1		1
43	MESIN GERGAJI BESI	Unit	2		1
44	TENDA PLETON	Unit	6		6
45	TENDA POSKO	Unit	6		6
46	TENDA REGU/PENGUNGS	Unit	2		2
47	TENDA KELUARGA	Unit	6		6
48	KOMPRESSOR SELAM	Unit	1		1
49	EARLY WARNING SYSTEM TANAH LONGSOR DAN BANJIR	Unit	26		26
50	TELEVISI	Unit	5		5
51	SOUND SYSTEM	Unit	3		3
52	CAMERA VIDEO	Unit	4		4

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

- ✓ Ruang dan peralatan PUSDALOPS sebanyak 1 unit.
- ✓ Media Informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi berupa :
 - Instagram : @bpbdkaranganyar
 - Facebook : BPBD Kabupaten Karanganyar
 - Twitter : @BPBD_Kra
 - Whatsapp : 08112637243
 - Website : www.bpbd.karanganyarkab.go.id
 - E-mail : bpbdkaranganyar@gmail.com
- ✓ Arsip sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Selain data peralatan dan aset tersebut, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga terdapat persediaan logistik berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk korban terdampak bencana.

Logistik tersebut antara lain adalah kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk tempat pengungsian dan peralatan dapur umum.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD adalah unsur pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Kepala BPBD mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar, dari capaian kinerja Tahun 2020-2024, dapat digambarkan tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan standar yang telah disepakati seperti diperlihatkan dalam tabel 2.4. dan realisasi anggaran setiap tahun diperlihatkan dalam tabel 2.5, sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Pertumbuhan Kinerja Indikator BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-							Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Tujuan																		
	Renstra 2018-2023																		
1.	% berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)	%	0,06	0,06	0,05	0,05	-	-	-	0,04	0,06	0,12	0,15	-	150	100	41,67	33,33	-
	Renstra 2024-2026																		
1.	Indek Risiko Bencana	indeks	-	-	-	-	82	81	80	-	-	-	-	87,71	-	-	-	-	93,49
II.	Sasaran																		
	Renstra 2018-2023 dan 2024-2026																		
1.	% Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	%	4,52	4,52	6,78	9,03	22,03	25,98	31,07	4,52	5,65	10,17	18,08	24,86	100	125	150	200	112,8
2.	Nilai SAKIP	Skor	65	65,5	66	67	72,2	72,5	73	65,21	70,52	69,65	71,2	72,40	100,32	107,66	105,53	98,6	100,28
III.	Program																		
	Renstra 2018-2023 dan 2024-2026																		
1.	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-							Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Indeks	0,75	0,76	0,78	0,8	-	-	-	0,75	0,75	0,79	0,78	0,8	100	98,68	101,28	97,5	-

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian Indeks Risiko Bencana pada tahun 2024 adalah 87,71 dengan persentase capaian 93,49 dari target tahun 2024 sebesar 82. Capaian 87,71 termasuk kategori sedang. Capaian di tahun 2024 belum sesuai target karena berdasarkan perhitungan BNPB Indeks Ketahanan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Risiko Bencana belum mengalami kenaikan signifikan.

Untuk Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan hasil penilaian IKD yang diverifikasi oleh BNPB belum seluruhnya menunjukkan data dukung yang sesuai sehingga capaian belum sesuai target. Nilai IKD ditahun 2024 adalah 0,8 dengan kategori sedang.

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Keuangan BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024

NO	PROGRAM	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	11	12	13	14	16	17	18	19
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.211.854	3.285.314	4.241.034	3.318.840	2.908.570	2.072.054	3.085.800	3.886.747	3.110.311	94	94	92	94
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	7.575.900	3.580.120	2.634.911	2.740.752	2.437.104	7.433.393	3.267.603	2.564.619	2.681.035	98	91	97	98

Tabel 2. 6 Kejadian Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020- 2024

NO.	LOKASI	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kec. Karanganyar	9	10	12	14	13
2.	Kec. Jaten	4	11	6	9	9
3.	Kec. Kebakramat	5	4	8	5	12
4.	Kec. Tasikmadu	9	7	5	5	13
5.	Kec. Mojogedang	8	8	6	13	22
6.	Kec. Karangpandan	11	16	14	11	21
7.	Kec. Matesih	13	18	11	11	23
8.	Kec. Tawangmangu	9	15	17	9	14
9.	Kec. Ngargoyoso	27	24	28	20	38
10.	Kec. Kerjo	8	13	11	17	19
11.	Kec. Jenawi	15	10	12	18	17
12.	Kec. Jumantono	8	6	10	14	12
13.	Kec. Jumapolo	12	17	10	12	9
14.	Kec. Jatipuro	7	6	4	7	12

NO.	LOKASI	2020	2021	2022	2023	2024
15.	Kec. Jatiyoso	8	13	19	13	14
16.	Kec. Colomadu	4	1	4	8	8
17.	Kec. Gondangrejo	7	10	4	19	23
	Jumlah	164	189	181	205	279

Tabel 2. 7 Jumlah Kerusakan dan Kerugian serta Korban Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerusakan (Rp)	4.061.980.850	4.409.180.850	4.908.180.850	5.721.725.000	4.461.097.915
2	Kerugian (Rp)	759.681.500	826.634.000	1.727.870.500	847.960.000	1.136.046.500
3	Kerusakan + Kerugian (Rp)	4.821.662.350	5.235.814.850	6.636.397.785	6.569.685.000	5.597.144.415
4	Jumlah Korban Terdampak Bencana	362	582	1083	1393	3695

Tabel 2. 8 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenis kejadian

No	Jenis Kejadian	Banyaknya Kejadian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angin Ribut	23	40	40	35	98
2	Banjir	3	5	5	4	1
3	Kebakaran	34	43	23	78	69
4	Pergerakan Tanah	0	1	0	1	0
5	Rumah Roboh	18	16	14	10	14
6	Tanah Longsor	86	84	99	70	91
7	Kekeringan	0	0	0	7	6
	TOTAL	164	189	181	205	279

Kejadian bencana alam selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar yang tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 279 kejadian. Jenis bencana yang terjadi antara lain yaitu longsor, angin ribut, banjir, kebakaran, tanah gerak dan rumah roboh serta kekeringan. Jenis kejadian bencana terbesar adalah kejadian tanah longsor yaitu sebanyak 99 kejadian dan terjadi pada tahun 2022. Sedangkan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam terbesar juga terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.6.636.397.785,- (enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Kejadian bencana harus disikapi dengan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana dimasa yang akan datang.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Persentase Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Karanganyar yang sudah dibentuk sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 44 desa atau 24,86% dari jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Karanganyar. Destana yang terbentuk selain didanai oleh APBD Kabupaten Karanganyar juga didanai oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dan juga Study Campus. Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Desa/Kelurahan Tangguh bencana di Kabupaten Karanganyar

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	JENIS ANCAMAN	TAHUN	SUMBER
1	JATIYOSO	Wukirsawit	TANAH LONGSOR	-	SIBAT
2	TAWANGMANGU	Tengklik	TANAH LONGSOR	-	SIBAT
3	NGARGOYOSO	Girimulyo	TANAH LONGSOR	-	KSB
4	KERJO	Plosorejo	TANAH LONGSOR	2009	Provinsi
5	JENAWI	Balong	TANAH LONGSOR	2014	Provinsi
6	NGARGOYOSO	Berjo	TANAH LONGSOR	2014	Provinsi
7	TAWANGMANGU	Tawangmangu	TANAH LONGSOR	2015	Provinsi
8	KARANGPANDAN	Gerdu	TANAH LONGSOR	2019	Provinsi
9	KARANGPANDAN	Karangpandan	TANAH LONGSOR	2019	Provinsi
10	JENAWI	Menjing	TANAH LONGSOR	2020	Kabupaten
11	KERJO	Plosorejo	TANAH LONGSOR	2019	Kabupaten
12	NGARGOYOSO	Nglegok	TANAH LONGSOR	2020	Kabupaten
13	JATIYOSO	Karangsari	TANAH LONGSOR	2020	Kabupaten

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	JENIS ANCAMAN	TAHUN	SUMBER
14	NGARGOYOSO	Kemuning	TANAH LONGSOR	2021	KKN UNS
15	NGARGOYOSO	Ngargoyoso	TANAH LONGSOR	2021	KKN UNS
16	JATIYOSO	Wonorejo	TANAH LONGSOR	2022	Kabupaten
17	GONDANGREJO	Dayu	BANJIR	2022	Kabupaten
18	JATIYOSO	Beruk	TANAH LONGSOR	2023	Kabupaten
19	JATIPURO	Jatipurwo	TANAH LONGSOR	2023	Desa
20	KEBAKKRAMAT	Waru	BANJIR	2023	Kab
21	MATESIH	Karangbangun	TANAH LONGSOR	2023	Desa
22	JUMAPOLO	Kedawung	TANAH LONGSOR	2023	Desa
23	JENAWI	Gumeng	TANAH LONGSOR	2023	KKN UNS
24	MATESIH	Girilayu	TANAH LONGSOR	2023	Desa
25	JENAWI	Lempong	TANAH LONGSOR	2023	KKN UNS
26	COLOMADU	Paulan	GEMPA BUMI, ANGIN KENCANG	2023	Desa
27	JENAWI	Seloromo	TANAH LONGSOR	2023	Desa
28	JUMAPOLO	Kwangsan	TANAH LONGSOR	2023	Desa
29	KARANGPANDAN	Doplang	TANAH LONGSOR	2023	Desa
30	MATESIH	Matesih	TANAH LONGSOR	2023	Desa
31	MATESIH	Koripan	TANAH LONGSOR	2024	Desa
32	JENAWI	Sidomukti	TANAH LONGSOR	2024	Desa
33	KARANGPANDAN	Dayu	TANAH LONGSOR	2024	Desa
34	MATESIH	Pablengan	TANAH LONGSOR	2024	Desa
35	TAWANGMANGU	Plumbon	TANAH LONGSOR	2024	Kab
36	TAWANGMANGU	Gondosuli	TANAH LONGSOR	2024	Kab
37	NGARGOYOSO	Segorogunung	TANAH LONGSOR	2024	Kab
38	JATIYOSO	Tlobo	TANAH LONGSOR	2024	Prov+Baznas + Desa
39	JATIYOSO	Wonokeling	TANAH LONGSOR	2024	Prov+Baznas + Desa
40	JUMANTONO	Tugu	MULTI ANCAMAN	2024	Prov+Baznas + Desa
41	KARANGPANDAN	Salam	TANAH LONGSOR	2024	Prov+Baznas + Desa
42	JATIYOSO	Petung	TANAH LONGSOR	2024	Desa
43	JUMANTONO	Ngunut	CUACA EKSTREM	2024	Desa
44	KARANGPANDAN	Karang	TANAH LONGSOR	2024	Kabupaten

4. Kelompok Sasaran Layanan

BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki beragam program dan layanan yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah empat kelompok sasaran utama yang menjadi fokus layanan:

- a. Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana,**
Termasuk penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem.
- b. Desa Tangguh Bencana (Destana),**
Desa-desa yang dibina untuk memiliki kapasitas dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana secara mandiri.
- c. Relawan dan Komunitas Peduli Bencana,**
Kelompok masyarakat yang dilatih dan diberdayakan untuk membantu dalam upaya penanggulangan bencana.
- d. Dunia Usaha dan Lembaga Peduli Bencana,**
Perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan lainnya.
- e. Lembaga Pendidikan dan Penelitian,**
Institusi yang berperan dalam penelitian, edukasi, dan pelatihan terkait penanggulangan bencana.
- f. Media dan Saluran Informasi,**
Platform yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

5. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Mitra BPBD dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam penanggulangan bencana yaitu Satpol PP (Damkar), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang BPBD Kabupaten Karanganyar, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Belum semua dokumen kebencanaan tersusun;
- b. Belum semua satuan pendidikan aman bencana;
- c. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pencegahan bencana;
- d. Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan alat EWS;
- e. Belum optimalnya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- f. Belum optimalnya peran pentahelik dalam penanggulangan bencana.

2. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Belum optimalnya peran pentahelik dalam penanggulangan bencana;
- b. Penanggulangan kedaruratan yang belum optimal;
- c. Belum optimalnya peran masyarakat perkotaan dalam kedaruratan bencana;
- d. Pemanfaatan media pelaporan tingkat kabupaten (sapa Mas) belum terintegrasi; dan
- e. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

- f. Belum terpenuhinya kebutuhan data secara rinci mengenai kerusakan serta kebutuhan pasca bencana menyulitkan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif;
- g. Belum optimalnya Koordinasi Antar Lembaga; dan
- h. Belum optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur menyulitkan dalam mengukur keberhasilan program dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar dan permasalahan yang ada dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

Tabel 2.1.
Permasalahan BPBD Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana Secara Berkelanjutan	Keterbatasan dalam aspek kelembagaan, sumber daya, koordinasi antar pihak, dan partisipasi masyarakat yang menyebabkan respons dan pemulihan bencana belum efektif dan tidak berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum semua dokumen kebencanaan tersusun b. Belum semua satuan pendidikan aman bencana c. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pencegahan bencana d. Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan alat EWS e. Belum optimalnya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana f. Belum optimalnya peran pentahelik dalam penanggulangan bencana g. Belum optimalnya peran pentahelik dalam penanggulangan bencana h. Penanggulangan kedaruratan yang belum optimal i. Belum optimalnya peran masyarakat perkotaan dalam kedaruratan bencana j. Pemanfaatan media pelaporan tingkat kabupaten (sapa Mas) belum terintegrasi k. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM karena waktu pelaksanaan yang terbatas l. Belum terpenuhinya kebutuhan data secara rinci mengenai kerusakan serta kebutuhan pascabencana menyulitkan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif. m. Belum optimalnya Koordinasi Antar Lembaga. n. Belum optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur menyulitkan dalam mengukur keberhasilan program

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Perumusan isu strategis BPBD memperhatikan permasalahan yang ada di BPBD, Isu KLHS, Isu Nasional dan Isu Regional, berikut tabel kerja perumusan isu strategis BPBD.

Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPBD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Tersedianya relawan siaga bencana; 2. Dukungan teknologi dan informasi	1. Tingginya risiko bencana alam 2. Belum optimalnya sistem peringatan dini 3. Belum optimalnya peran pentahelik dalam penanggulangan bencana	Perubahan Iklim dan Risiko Bencana	Perubahan Iklim Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu/angin/gelombang laut.	1. Perlindungan Sosial yang Adaptif; 2. Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana	Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana Secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta peninjauan terhadap visi-misi kepala daerah, sasaran RPJM,D, isu strategis urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. **Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana Secara Berkelanjutan**

Pelaksanaan upaya penanggulangan bencana seringkali belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Penanggulangan bencana yang berkelanjutan adalah upaya preventif dan responsive yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Penanggulangan bencana yang berkelanjutan mencakup seluruh siklus bencana: **mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan)**. Penanggulangan bencana yang berkelanjutan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan tahan terhadap bencana. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, dengan fokus pada mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana yang berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.** Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera.

Tujuan jangka menengah BPBD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut **“Menurunnya tingkat risiko bencana daerah”**. Sedangkan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana; dan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun						Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya tingkat risiko bencana daerah		Indeks Risiko Bencana	Hasil perhitungan BNPB	Angka	87,71	87,42	86,55	85,68	84,82	83,98	83,14	
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil perhitungan BNPB	Angka	0,80	0,81	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Masyarakat	Nilai	86,02	86,2	86,4	86,6	86,8	86,9	87	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi dan kebijakan BPBD menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (*outcome*) dari program prioritas RPJMD Kabupaten Karanganyar yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi BPBD. Rumusan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan rencana menyeluruh BPBD Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meraih tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh ini juga berperan sebagai alat untuk mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Meningkatkan mitigasi bencana dengan membuat pemetaan risiko bencana, pemantauan dan penyebaran informasi, memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta memberikan peringatan dini kepada masyarakat jika terjadi ancaman.
- b. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi, membangun solidaritas masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan serta memastikan dukungan pemerintah dalam bentuk sumber daya, fasilitas, dan program yang mendukung pengurangan risiko bencana
- c. Penguatan Kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan, peningkatan akses informasi dan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana

Sasaran 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja melalui penyusunan program berdasarkan data dan hasil evaluasi sebelumnya, serta memastikan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan (IKK) secara terukur dan konsisten.
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3. 2 Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Internalisasi peningkatan kesiapsiagaan Daerah	Penguatan Sumber Daya Manusia Menghadapi Bencana	Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanggulangan Bencana	Perwujudan Masyarakat Tangguh Bencana	Perwujudan penanggulangan Bencana yang Berkelanjutan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana 2. Pemetaan kebutuhan pelatihan dalam meningkatkan kesiapsiagaan. 3. Pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan penanggulangan bencana 4. Penyusunan rencana pengadaan sarpras. 5. Mengidentifikasi mitra dalam penanganan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Sekolah aman bencana 2. Pelatihan kepada petugas dan masyarakat pencegahan dan penanganan bencana 3. Penyusunan rencana kontingensi dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 4. Pengadaan sarana dan prasarana sebagai deteksi dini terhadap bencana 5. Koordinasi dengan mitra penanganan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi di daerah rawan bencana 2. Pelatihan penggunaan dan perawatan sarana prasarana penanganan bencana 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 4. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana. 5. Mengidentifikasi kontribusi mitra dalam penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan desa siaga bencana dan sekolah aman bencana 2. Simulasi penanganan bencana tingkat Kabupaten 3. Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana 5. Melakukan penguatan terhadap mitra penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replikasi pembentukan desa siaga bencana dan sekolah aman bencana 2. Penanganan bencana sesuai dengan Standar 3. Penyusunan rencana kontingensi 4. Memastikan sarana dan prasarana siap digunakan 5. Memastikan mitra penanggulangan bencana siap bekerja sama

3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan, pelatihan kesiapsiagaan, dan pengembangan rencana tanggap darurat.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya dan pentingnya pengurangan risiko bencana.
3. Memastikan ketersediaan peralatan darurat, logistik, dan sumber daya yang diperlukan.
4. Membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini yang akurat dan terintegrasi.
5. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontingensi yang komprehensif dan terintegrasi.
6. Memberikan pelatihan kepada petugas penanggulangan bencana dan masyarakat tentang berbagai aspek penanganan bencana (pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana).
7. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan pelayanan publik melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	Penanggulangan Bencana	Pengurangan risiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan, pelatihan kesiapsiagaan, dan pengembangan rencana tanggap darurat. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya dan pentingnya pengurangan risiko bencana. 3. Memastikan ketersediaan peralatan darurat, logistik, dan sumber daya yang diperlukan. 4. Membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini yang akurat dan terintegrasi. 5. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontingensi 	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			<p>yang komprehensif dan terintegrasi.</p> <p>6. Memberikan pelatihan kepada petugas penanggulangan bencana dan masyarakat tentang berbagai aspek penanganan bencana (pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana).</p> <p>7. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>8. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan pelayanan publik melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik.</p>	

Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Sesarengan Mbangun Karanganyar “Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera		
Misi 5 RPJMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama		
Tujuan 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah		
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat risiko bencana daerah	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan mitigasi bencana dengan membuat pemetaan risiko bencana, pemantauan dan penyebaran informasi, memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta memberikan peringatan dini kepada	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan, pelatihan kesiapsiagaan, dan pengembangan rencana tanggap darurat. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya dan pentingnya

		<p>masyarakat jika terjadi ancaman.</p> <p>2. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi, membangun solidaritas masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan serta memastikan dukungan pemerintah dalam bentuk sumber daya, fasilitas, dan program yang mendukung pengurangan risiko bencana.</p> <p>3. Penguatan Kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan, peningkatan akses informasi dan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana</p>	<p>pengurangan risiko bencana.</p> <p>3. Memastikan ketersediaan peralatan darurat, logistik, dan sumber daya yang diperlukan.</p> <p>4. Membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini yang akurat dan terintegrasi.</p> <p>5. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontingensi yang komprehensif dan terintegrasi.</p> <p>6. Memberikan pelatihan kepada petugas penanggulangan bencana dan masyarakat tentang berbagai aspek penanganan bencana (pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana).</p> <p>7. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha</p>
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja melalui penyusunan program berdasarkan data dan hasil evaluasi sebelumnya,	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan pelayanan publik melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik.

		<p>serta memastikan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan (IKK) secara terukur dan konsisten</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p>	
--	--	---	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana

Program ini di fokuskan untuk melakukan upaya mitigasi bencana dari pra bencana, kejadian bencana dan pasca bencana. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan sebagai berikut
 - 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota;
 - 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota;
 - 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
 - 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - 7) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota;
 - 8) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - 9) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - 10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - 11) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan Subkegiatan sebagai berikut
 - 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
 - 2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - 4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota;
 - 6) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - 7) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;

- 2) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- 3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- 6) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota;
- 7) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
- 8) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
- 9) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota;
- 10) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- 11) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota; dan
- 12) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini di fokuskan untuk menyelesaikan mendukung pencapaian program lainnya. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Subkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Mebel;
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra BPBD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
TJ 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah	Menurunnya tingkat risiko bencana daerah				Indeks Risiko Bencana		
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana			Indeks Ketahanan Daerah		
			Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pesentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
				Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terlaksananya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana,	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				tanggap darurat dan pasca bencana)			
				Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
				Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	2.341.034.600	100	2.437.104.000	100	2.437.104.000	100	2.437.104.000	100	2.437.104.000	100	2.437.104.000	100	14.526.554.600	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100		100		100	100	100		100		100		100		
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100	100	100		100		100		100		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	62.600.600	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	462.600.600	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	1100	2000	59.950.600	2000	75.000.000	2000	75.000.000	2000	75.000.000	2000	75.000.000	2000	75.000.000	10000	434.950.600	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Doku men	0	1	2.650.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	27.650.000	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	223.329.750	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	265.000.000	100	1.558.329.750	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	0	1	5.075.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	30.075.000	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	12	10	15.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	65	115.000.000	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Laksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	220	250	30.136.500	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	2000	230.136.500	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Laksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	25	45	20.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	225	120.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	10	6	30.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	40	230.000.000	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	30	20	14.141.400	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	150	114.141.400	
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	30.000.000	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	27.500.000	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di	laporan	0	1	3.280.850	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	28.280.850	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	kawasan tempat tinggalnya																	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	27.500.000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	5	3	95.696.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	595.696.000	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	1.817.947.700	100	1.858.604.000	100	1.858.604.000	100	1.858.604.000	100	1.858.604.000	100	1.858.604.000	100	11.110.967.700	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	10.000.000	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	0	1	4.015.150	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	5	24.015.150	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	3695	600	1.672.554.000	1000	1.698.604.000	1000	1.698.604.000	1000	1.698.604.000	1000	1.698.604.000	1000	1.698.604.000	5000	10.165.574.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Tempat yang Aman																			
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	0	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	28.000.000		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	0	20	11.112.950	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	150	111.112.950		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	650	400	125.000.000	400	125.000.000	400	125.000.000	400	125.000.000	400	125.000.000	400	125.000.000	2000	750.000.000		
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	2.265.600	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	5	22.265.600		
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	100	237.156.550	100	233.500.000	100	233.500.000	100	233.500.000	100	233.500.000	100	233.500.000	100	1.404.656.550		
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1.418.850	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	26.418.850		

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Doku men	1	1	121.785.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	146.785.000	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Doku men	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	30.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Lapor an	2	1	15.011.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	115.011.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	0	62	35.000.000	63	72.500.000	63	72.500.000	63	72.500.000	63	72.500.000	63	72.500.000	315	397.500.000	
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	100	75	30.811.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	400	280.811.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	1	17.633.700	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	267.633.700	
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lemba ga	0	10	3.500.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	50	28.500.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	0	1	1.400.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	26.400.000	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	1.975.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	26.975.000	
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	28.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	622.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.622.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,4	72,5	2.865.211.049	73	2.908.570.149	73,2	2.908.570.149	73,4	2.908.570.149	73,6	2.908.570.149	73,8	2.908.570.149	73,8	17.408.061.749	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Perse n	100	100	24.477.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	69.477.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	23.852.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	33.852.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TUPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	1	625.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	15	5.625.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	Perse n	100	100	2.337.977.149	100	2.341.320.149	100	2.341.320.149	100	2.341.320.149	100	2.341.320.149	100	2.341.320.149	100	14.044.577.894	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	23	2.337.330.149	23	2.339.320.149	23	2.339.320.149	23	2.339.320.149	23	2.339.320.149	23	2.339.320.149	23	14.033.930.894	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	647.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	10.647.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Perse n	100	100	42.250.000	100	47.250.000	100	47.250.000	100	47.250.000	100	47.250.000	100	47.250.000	100	278.500.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TUPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	65	42.250.000	65	42.250.000	65	42.250.000	65	42.250.000	65	42.250.000	65	42.250.000	325	253.500.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Doku men	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Perse n	100	100	63.627.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	190.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	8	4.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	48	19.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	16	4.383.500	18	4.000.000	18	4.000.000	18	4.000.000	18	4.000.000	18	4.000.000	100	24.383.500	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36	22	10.000.000	20	4.000.000	20	4.000.000	20	4.000.000	20	4.000.000	20	4.000.000	100	30.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	10	20.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	10	6	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	48	24.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an	10	8	4.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	36	19.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	400	50	35.643.500	50	13.000.000	50	13.000.000	50	13.000.000	50	13.000.000	50	13.000.000	300	100.643.500	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	100	60	1.600.000	80	3.000.000	80	3.000.000	80	3.000.000	80	3.000.000	80	3.000.000	460	16.600.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Perse n	100	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	2	60.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	-	0	-	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	0	0	3	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	13	45.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	45.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	1	40.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse n	100	100	77.600.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	492.600.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lapora n	0	10	2.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	50	17.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lapora n	36	36	75.600.000	36	76.000.000	36	76.000.000	36	76.000.000	36	76.000.000	36	76.000.000	180	455.600.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lapora n	0	0	0	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	60	20.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Perse n	100	100	319.279.900	100	340.000.000	100	340.000.000	100	340.000.000	100	340.000.000	100	340.000.000	100	2.019.279.900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					Target	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21	271.390.000	20	240.000.000	20	240.000.000	20	240.000.000	20	240.000.000	20	240.000.000	100	1.471.390.000	
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	25	50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	161	56	32.889.900	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	400	182.889.900	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	115.000.000	

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan :

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

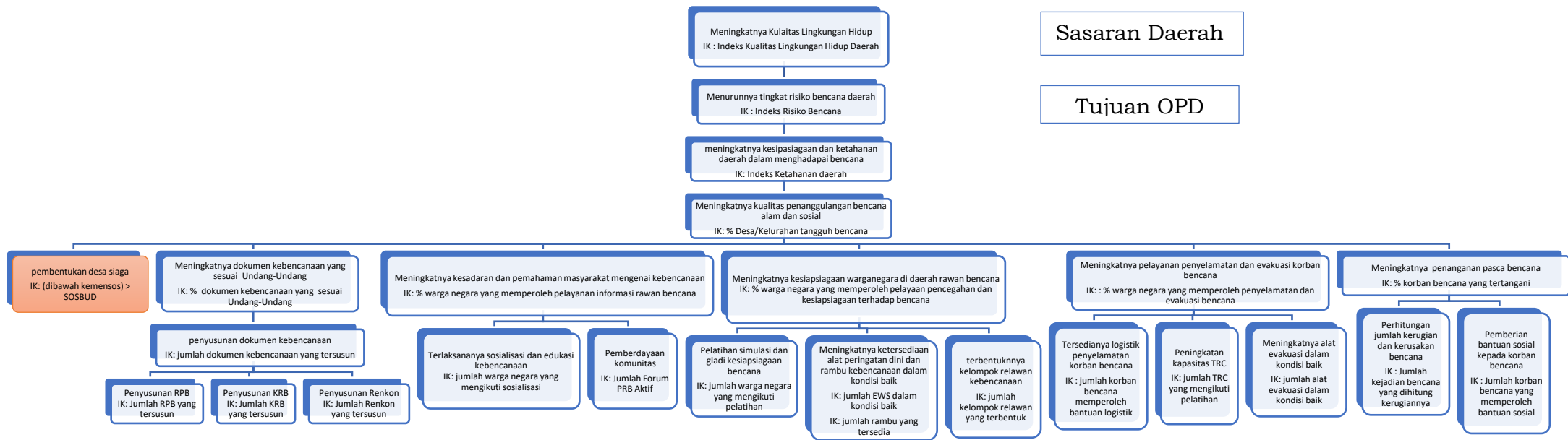
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian 1 (satu) tujuan daerah dan 1 (satu) sasaran daerah yaitu :

- Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah dengan sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (sasaran 2).

Secara ringkas dukungan BPBD terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja sebagai berikut :



Bagan 4. 1 Pohon Kinerja BPBD

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama BPBD Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama BPBD Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama BPBD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Risiko Bencana	Angka	87,71	87,42	86,55	85,68	84,82	83,98	83,14	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,8	0,81	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,02	86,2	86,4	86,6	86,8	86,9	87	

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPBD Kabupaten Karanganyar selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) BPBD Kabupaten Karanganyar:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati baru, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Karanganyar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan perangkat daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPBD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPBD Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra BPBD Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pedoman Transisi

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan

disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen Renstra BPBD menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas risiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

